

**PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI
PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BANDUNG)**

***RECRUITMENT PROCESS OF LEGISLATIVE MEMBERS (STUDY IN
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANDUNG REGIONAL
LEADERSHIP)***

Yayan Rudiyanto¹, Emi Rachmawati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

²e.rachmawati@gmail.com

ABSTRAK

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis. Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam system demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*). Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideology partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.

Kata kunci: Rekrutmen Calon Legislatif

ABSTRACT

Political parties are the main channel to fight for the will of the people of the nation and the state, as well as a means of regeneration and recruitment of leadership in the administration of the state. In modern political design political parties function to review and review constituent interests in strategic policy making. Observing these provisions can be seen that political parties have a very important position and role in the democratic system. Political parties as tools of the nation's struggle will run well along with optimizing the roles of political parties, both as a means of political communication, political socialization,

political recruitment, and conflict management. Whatever the system of recruitment from political parties will not be separated from the two sides of the process, namely; compile criteria that will become qualifications for recruitment and how the recruitment mechanism will be carried out. The criteria or qualifications that can be determined to determine the recruitment of legislative candidates is the minimum standard that must be owned by a person to be nominated. Criteria or qualifications are arranged in the form of rules or requirements. Regarding the nomination of legislative members, there are at least two qualifications that should be fulfilled, namely the qualifications set by the state through laws and qualifications set by political parties. The qualifications set by the state are usually general, the qualifications set by political parties are to set a number of other requirements. In addition to referring to party ideology, these requirements must also be correlated with the implementation of the functions of the legislature in the future.

Keywords: *Legislative Candidate Recruitment*

1. Pendahuluan

Dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 7 poin (e) mengamanatkan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender. Di mana Undang-undang ini mensyaratkan untuk terpenuhinya fungsi dari partai politik tentang rekrutmen politik dalam wilayah jabatan politik (parlemen) melalui proses-proses yang berjalan searah dengan demokrasi.

Rekrutmen politik di mana harus melewati mekanisme terbuka untuk umum, dalam arti sejauhmana orang yang akan di rekrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan masyarakat banyak atau konstituen partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah di rekrut.

Peran dewan pimpinan pusat (DPP) tampak sangat penting dalam penentuan keputusan strategis terkait dengan pemilihan kepala daerah

(pilkada), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (anggota Legislatif) dan pencalonan jabatan politik. Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat memilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota parlemen. Mewujudkan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisinya sejak partai politik (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah.

Proses perekrutan untuk calon anggota legislatif Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013

tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif;
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar;
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Namun, dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan Rekrutment Calon Anggota Legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil peninjauan awal melalui observasi, peneliti mendapatkan informasi dari salah satu anggota Partai Golkar menyebutkan bahwa proses perekrutan untuk calon anggota legislatif Partai Golkar belum semuanya memenuhi kriteria seperti tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

- 1) Kompetensi sebagai anggota legislatif dalam menjalankan tugas-tugasnya belum memadai. Contohnya calon anggota legislatif belum memiliki berbagai bidang ilmu, karena anggota legislatif harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat yang terkait masalah kenegaraannya, baik ekonomi, politik, budaya maupun sosial. Jadi bukan hanya cukup popularitas dalam meraup sebanyak mungkin suara.

- 2) Pengabdian bagi calon anggota legislatif harus memenuhi kriteria aspek pengabdian minimal 5 tahun bagi DPRD dan 10 tahun bagi DPR RI dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar tapi kenyataannya ada beberapa calon yang tidak memenuhi kriteria pengabdian yang telah ditetapkan partai.
- 3) Bagi calon anggota legislatif harus memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT) tapi dalam kenyataannya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, ada beberapa calon yang tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan masyarakat tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya yang kelak akan memepertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”.

Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para Caleg dari Partai Golkar karena para Caleg harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu. Indikasi - indikasi permasalahan di atas menunjukkan bahwa partai politik melalui rekrutmen calon anggota legislatif yang mewakilinya belum dapat menyelenggarakan rekrutmen politik yang diharapkan. Problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju tatanan politik yang demokratis di parlemen (DPR dan DPRD) terutama dalam rekrutmen caleg ditingkat lokal. Proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antar partai politik dan

masyarakatsipil. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan di kursi parlemen. Parpol merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh parpol tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian parpol maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif. Dasar penguat dari suatu partai politik yaitu memiliki keanggotaan yang kuat dalam hal ini dimaksudkan bahwa jumlah anggota yang dimiliki parpol semakin banyak maka dasar kekuatannya pun juga kuat.

Peranan serta warga negara yang bersifat aktif, pasif, positif, dan negatif, pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dari demokrasi politik. Pemahaman setiap warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan perkembangannya, akan dapat memperkuat optimisme dan komitmennya terhadap peranannya. Nilai-nilai demokrasi sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, begitu pula prinsip-prinsip yang dianutnya seperti prinsip kebebasan/kemerdekaan, persamaan dan toleransi menawarkan penataan kehidupan masyarakat dan bernegara yang lebih baik dan manusiawi. Selain itu, untuk dapat menjalankan fungsi partai politik secara maksimal harus memiliki kursi di parlemen baik daerah, provinsi, maupun pusat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Proses Rekrutmen Politik calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pada pemilihan umum yang akan datang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pada pemilihan umum yang akan datang ?

2. Tinjauan Pustaka

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Surbakti (2010: 150 – 151).

Rekrutmen politik di Indonesia pada dasarnya sangatlah tertutup. Hal ini terjadi karena dominannya lembaga kepresidenan.

Siapa yang akan menjabat apa, kapan, dan di mana, sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat. Proses rekrutmen sering kali didasarkan pada dasar patronage politik, bukan atas dasar ²kapasitas dan kepemimpinan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Hal ini terlihat sekali, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah (Gaffar, 1999).

Menurut Czudnowski dalam Pamungkas, 2(011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran – peran politik aktif. Sedangkan Gabriel Almond dalam Romli, (2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Menurut Rahman (2007:246) bahwa “Rekrutmen politik berasal dari dua kata yaitu Rekrutmen dan Politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti

urusan negara, jadi rekrutmen Politik bisa diartikan suatu proses penyeleksian warga negara untuk ditempatkan pada lembaga negara guna mengurus urusan negara melalui proses yang telah dirumuskan, proses penyeleksian dimana setiap warga yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berhak untuk menempati posisi di lembaga negara. artinya setiap warga yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai hak yang sama untuk ditempatkan sebagai calon anggota DPRD.

Koirudin (2004:99) mengatakan pentingnya fungsi rekrutmen politik : “Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat”.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat

memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.

2.1 Fungsi dan Sistem Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Menurut Suharsono (2004: 117), rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Sedangkan menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk

melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin, 2007: 113).

Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup, *Pertama* model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara / pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. *Kedua* model sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang

demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut. Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa saja yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

2.2 Model Rekrutmen

Untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus memperoleh suara yang bersaing dalam pemilihan umum. Perebutan suara dalam pemilihan umum dihadapkan pada realitas sosial dalam menentukan pola rekrutmen yang digunakan untuk mempengaruhi proses perjuangan partai dalam memperoleh eksistensi. Pada proses menyiapkan calon-calon yang diusung oleh partai politik, biasanya terdapat pola rekrutmen yang berbeda-beda dari masing-masing partai politik tak terkecuali juga yang dilakukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung. Hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme yang dilakukan partai dalam melakukan tahapan

rekrutmen awal hingga akhir. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari sifat rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam menentukan rekrutmen yang dilakukan secara Model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, ditegaskan oleh Seligman yang dikutip oleh Soetomo (2007), rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan (Soetomo, 2007).

Jacob telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Soetomo, 2007).

. Untuk mengetahui sifat tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang bersangkutan dengan sifat rekrutmen tersebut seperti syarat dan prosedur yang dilakukan oleh partai politik tersebut, ada tidaknya sarana kontrol dari

masyarakat mengenai rekrutmen yang dilakukan, ada tidaknya calon eksternal yang direkrut serta ada tidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Perbedaan dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dapat juga terlihat dari metode rekrutmen politik yang dilakukan, baik menggunakan metode ilmiah ataupun dengan menggunakan metode non ilmiah. Dalam proses tersebut, metode rekrutmen politik tersebut bersangkutan dengan ada tidaknya pedoman yang dijadikan acuan serta digunakan dalam menentukan calon legislatif yang diusung. dengan mekanisme sistem pemilu yang menekankan pada sistem proporsional terbuka setidaknya juga mengharuskan partai politik lebih selektif dalam melakukan kecenderungan dalam melakukan rekrutmen politik. Faktor-faktor penentu menjadi bahan pertimbangan juga dari partai politik tak terkecuali DPD Partai Golongan Karya dalam menentukan pola rekrutmennya dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2019.

Proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses rekrutmen politik calon legislatif berlandaskan rekrutmen sistem terbuka dan rekrutmen sistem tertutup akan menghasilkan rekrutmen yang optimal dalam penyelenggaraan pemilihan calon anggota Legislatif di Dewan Pimpinan daerah Partai Golkar Kabupaten Bandung.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan proses rekrutmen politik calon anggota Legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di wilayah Kabupaten Bandung, dapat digunakan secara optimal bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Legislatif

3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan, tafsiran – tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulisikan dan di persentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan – penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Validasi (keabsahan) data diperlukan dalam penelitian ini untuk menentukan keabsahan data, sehingga diperlukan teknik pemeriksaan, validasi dalam penelitian ini menggunakan trigulasi tujuan dari trigulasi adalah mengecek kebenaran data proses rekrutmen calon anggota legislatif DPD partai Golkar

kabupaten Bandung dan membandingkannya dengan data yang di peroleh dilapangan, pada witu yang berlainan dan sring menggunakan metode yang berlainan. Bentuk utuh yang dihasilkan dari penelitian ini adalah deskripsi tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif pada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung. Uraianya deskriptifnya sedemikian kompleksnya.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung

Proses pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 51 syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan. Dasar pemikiran tentang persyaratan yang sangat sederhana tersebut adalah bahwa partai tidak ingin memberatkan bagi para peserta pencalegan dalam pemilu. Karena gagasan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung hanya menegaskan bahwa calon wakil rakyat yang akan diusung nanti harus benar-benar merakyat sesuai dengan tema yang diusung oleh pimpinan pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai

Golongan Karya Kabupaten Bandung “suara Golkar suara rakyat”. Artinya bawasanya apa yang disuarakan oleh calon atau anggota legislatif dari partai Golkar merupakan suatu keterwakilan dari suara hati nurani rakyat.

Model rekrutmen politik yang sesuai dan diterapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung adalah model Seligman dan Jacob. Model ini merupakan model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik. Jacob (1962) telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh intitusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” di mana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Czudnowski dalam Soetomo, 2007).

4.3 Pelaksanaan Model Perekrutan Calon Anggota Legislatif

Bentuk implementasi strategi model di atas bervariasi, akan tetapi secara umum pada dasarnya bentuk implementasi dari strateginya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen kepengurusan di struktural partai

Golongan Karya Kabupaten Bandung kecamatan serta organisasi sayap beserta organisasi yang mendirikan dan yang didirikan oleh partai Golkar (Hasta Karya) dan kesemuanya disosialisasikan di Pimpinan Kecamatan masing-masing. Sehingga harapannya apa yang telah ditargetkan partai tentang strategi perekrutan calon anggota legislatif tersebut benar-benar tercapai.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung sudah mempersiapkan tim 7 (yang terdiri dari ketua dan sebagian besar pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meliputi sekretaris dan wakil ketua partai Golongan Karya Kabupaten Bandung untuk menjaring calon anggota legislatif yang dianggap layak dan sesuai dengan PD2LT pada partai Golongan Karya dan dianggap dapat memenangkan dan meraup suara yang banyak di pemilu legislatif. Dan tim 7 ini melakukan sosialisasi kepada calon anggota legislatif sehingga mencapai target yaitu sebanyak 50 orang pendaftar sebagai calon anggota legislatif dari DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung.

4.4 Keterlibatan Partai Golongan Karya dalam mempersiapkan Calon Tetap Anggota Legislatif dalam Pemilu

Upaya Partai Golongan Karya untuk menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik adalah adanya Pendidikan dan latihan (Diklat) Calon anggota legislatif bagi para calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu. Semua calon anggota legislatif akan mendapatkan pelatihan khusus yang dinamakan Diklat Calon anggota legislatif yang didalamnya memuat pengetahuan dan pelatihan menjadi seorang anggota legislatif.

Proses yang akan dilakukan partai adalah mempersiapkan anggota-anggota maupun kader yang akan maju. Kemudian setelah partai menentukan tim yang akan menyeleksi para calon, partai akan mempersiapkan DCS (Daftar Calon Sementara) menuju tahap selanjutnya, yakni DCT (Daftar Calon Tetap) yang sebelumnya terlebih dahulu akan dikonsultasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Golongan Karya dan dirapatkan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya, Abu Rizal Bakrie. Setelah adanya persetujuan dari ketua umum, calon akan diajukan pada waktu yang telah dijadwalkan dari pihak KPU telah memenuhi persyaratan. Kemudian partai akan membawa calon dalam penyusunan daftar calon tetap, partai pusat, dalam hal ini akan melimpahkan wewenangnya kepada DPD Provinsi akan mempersiapkan para calon di dapilnya masing-masing serta memberikan akses kepada calon untuk dihubungkan dengan pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota terkait. Untuk persiapan atribut berupa bendera partai, stiker partai, semua akan disediakan oleh partai.

4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung

Yang menjadi faktor pendukung dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif di DPD partai Golkar Kabupaten diantaranya yaitu 1. dalam Perekrutan calon anggota legislatif, partai Golkar mengambil dari semua kader yang sudah ada di struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung serta pengurus di tingkat kecamatan (PK) dan

di dalam ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hasta Karya). 2. Di samping itu adanya kesadaran diri pada setiap kader untuk selalu ingin turut andil dalam membesarkan dan memperjuangkan Partai Golkar terutama dalam hal ini Partai Golkar Kabupaten Bandung, karena Partai Golkar merupakan partai yang merakyat, dalam artian partai yang ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu, Partai Golkar merupakan salah satu partai besar yang perolehan suaranya selalu tinggi di setiap pemilu legislatif dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader Golkar yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung. Karena kebesaran partai berlambang beringin inilah sehingga masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader Partai Golkar akan berfikir bahwa dengan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar presentasi untuk menjadi anggota DPRD kabupaten Bandung akan menjadi lebih besar.

Beberapa hambatan yang dapat memperlambat proses perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung antara lain yaitu 1). Adanya pengunduran diri. 2). Tidak mau mendapatkan nomor urut bawah. 3). Kesulitan pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan. Selain itu, masalah internal antar calon yang masih terjadi pada umumnya adalah: a. Singkornisasi antara calon karena semua ingin menang. b. Zona penetapan baliho. Pemerintah

kabupaten/kota setempat tidak mengatur sedangkan semua calon ingin agar dirinya dikenal oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya muncul pemasangan pamflet kecil di pohon, tembok. c. Tidak adanya ketegasan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penanganan kecurangan oleh calon anggota legislatif. Partai tugasnya hanya mengingatkan jalur para calon anggota legislatif, namun selebihnya merupakan wewenang KPU dan Bawaslu.

Terlepas dari hambatan di atas, nantinya DPD partai Golongan Karya Kabupaten Bandung diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang selama ini terjadi. Bagaimanapun Rekrutmen politik calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga dapat dilihat dari kesulitan partai politik untuk menyusun daftar calon keanggotaan legislatif yang diajukan dalam setiap pemilu. Kurangnya kader partai dan menguatnya politik kekerabatan berdampak pada proses penentuan calon anggota legislatif. Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang yang akan memimpin masyarakat atau akan membuat kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Peran partai politik, calon anggota legislatif dan masyarakat secara umum terbilang amat krusial untuk kesuksesan Pemilu nantinya. Citra politik secara umum yang berada pada pemahaman masyarakat adalah bahwa politik adalah permainan kotor yang berujung pada korupsi. Namun pada sisi lain ketertarikan masyarakat terhadap politik lantas berubah menjadi ketertarikan oportunistis terhadap peluang ekonomi yang akan membawa keuntungan pribadi. Hal ini antara lain disebabkan oleh tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial.

4.6 Upaya yang dilakukan Oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam rekrutmen calon Anggota Legislatif antara lain :

1. Mengoptimalkan Kaderisasi.
2. Merealisaikan secara nyata program kerja yang telah dibuat.
3. Memperkuat infrastruktur partai salah satunya dengan mengembangkan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil kesimpulan penelitian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu 2014 (Studi di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung) maka penulis berkesimpulan bahwa model

rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung sesuai dengan model rekrutmen politik Seligman dan Jacob. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif. Kemudian calon anggota legislatif yang sudah mendaftarkan diri tersebut mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim tujuh yang berlangsung selama beberapa bulan. Setelah mekanisme penjurangan selesai maka nama-nama yang lolos dalam penjurangan akan dibawa kesidang pleno guna menentukan nomor urutnya. Dan yang terakhir yaitu para calon anggota legislatif yang telah mendapatkan nomor urut tersebut didaftarkan ke KPU. Dan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Bab VII tentang Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar. Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar. Dalam hal persyaratan, calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan persyaratan, calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan secara umum namun mendapat edaran khusus yang diberikan Tim Seleksi dengan menimbang persyaratan Partai Golkar

5.2 Saran

1. Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan

lainnya yang berkaitan dengan konsep - konsep rekrutmen politik sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

2. Saran praktis : kepada DPD partai Golkar Pada saat melakukan perekrutan calon anggota legislative, tidak adanya dikriminasi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggotalegislatif. Tim Seleksi seharusnya orang-orang yang terdiri dari pengurus yang tidak/belum mencalonkan diri sebagai bagian dari pemilu pada periodetersebut. Hal ini akan memicu adanya ketidak-adilan di dalamnya terutamadalam pemilihan DCT (Daftar Calon Tetap).

DAFTAR PUSTAKA

Buku -Buku

- Abdul Hamid. *Politisasi Birokrasi Dalam Pilkada Banten 2006*. Volume 11, Nomor 2 juli 2011 ISSN:1411-948X. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Almond, Gabriel. dan G Bingham, Powel. (1988). *A Word View Fourth Editions*. London.
- Azwar, Rully Chairul, 2008, *Politik Komunikasi Partai Golkar*, Jakarta: Grasindo Bandung: Simbiosis Rekatama Media Bandung.
- Budiardjo, Miriam 2000 *Pengantar Ilmu Politik* Jakarta Gramedia
- Budiardjo, Miriam 1998 *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Faturohman, Deden dan Wawan Sobari.2004 *Pengantar Ilmu Politik*. Malang Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang (UMM Press).
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. DKI Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola partai politik* DKI Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Faisal. Sanafiah 1999. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Dan Aplikasi* Malang:YA3
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly, Asshidiqqie. 2006. *Konstitusi dan konstitusional Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kencana, Inu 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*
- Koirudin .2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Romli, Lili, 2005, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3.
- Romli, Lili. *Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara : Studi Kasus Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004*, Jakarta: LIPI, 2005.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat, Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexi j. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadkarya offset.

- Norris, Pippa (ed). 1997. *Passage to Power : Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Pamungkas, Sigit .2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik di Indonesia :* Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarisme.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2014, *Metode Peneliian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung, ALFABETA
- Soedarsono. 2005. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soetomo. (2007). *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*. Jakarta:
- Prenada. (2007). *Perilaku Politik Legislatif*. Jakarta:Prenada
- Tricahyo, Ibnu 2009. *Reformasi Pemilu Malang: In -Trans Publishing*.
- Dokumen –Dokumen**
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik Partai. Jakarta Sinar Grafika.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bandung Fokusmedia.
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD dan DPRD. Bandung 2014 Fokusindo Mandiri.